

ZONA INDUSTRI LHOK SEUMAWE (ZILS) Studi Tentang Kesenjangan Sosial Budaya di Aceh Utara

Abdul Rachman Patji*

ABSTRACT

This article examines the problems of inequality in the process of social and cultural changes as the consequence of big-industries development in Aceh Utara, especially at the region called ZILS (Industrial Zone of Lhok Seumawe). The development itself is recognized to be a successful effort to lift up economy condition of the region. However, it also becomes a drive force for the birth of inequality phenomena among groups of society (i.e., industry, in-migrant and local people) in this region. Some important aspects of the inequality are caused by the imbalance patterns in fulfilment necessity of the groups, the inappropriateness of social and cultural considerations at industry planning and, last but not least, lack of harmonious communication between the people of industry, regional government and local society.

Pendahuluan

Tahun 1971 ketika ditemukannya sumber gas alam di padang Arun dapat disebut sebagai masa tinggal landas (*take-off*) bagi program industrialisasi di Aceh Utara. Penemuan itu mendasari

* Staf Peneliti Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI).

dibangunnya beberapa perusahaan industri besar, yaitu PT Arun NGL (*Natural Gas Liquid*) - pengolahan gas, pada tahun 1974; PT AAF (*Asean Aceh Fertilizer*) - pupuk, tahun 1981; PT PIM (Pupuk Iskandar Muda) tahun 1982; dan PT KKA (Kertas Kraft Aceh) tahun 1985. Semua industri besar tersebut, yang berada dalam satu wilayah industri yang kemudian dikenal dengan sebutan ZILS, mengandalkan gas alam sebagai salah satu bahan baku utamanya. Perkembangan industri-industri tersebut sangat pesat dan berpengaruh pula terhadap pembangunan daerah dan masyarakatnya.

Kontribusi perusahaan industri tersebut terhadap perkembangan perekonomian di Daerah Tingkat II Aceh Utara sangat positif. Keadaannya dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator, antara lain pada PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)¹ daerah itu. Pada tahun 1983, delapan tahun sejak PT Arun NGL berproduksi, tanpa memperhitungkan sumbangan migas dan berdasarkan harga konstan tahun tersebut, PDRB Aceh Utara hanya sebesar Rp.278.828,89 juta. Pada tahun itu, apabila sumbangan migas dihitung, maka jumlah PDRB-nya menjadi Rp.2.027.040,43 juta. Ketika PT AAF sudah berproduksi pada tahun 1984, tanpa memasukkan sumbangan migas dan berdasarkan harga konstan tahun 1983, PDRB Aceh Utara mencapai jumlah Rp.332.639,82 juta. Apabila sumbangan migas dimasukkan maka PDRB-nya meningkat menjadi Rp.2.646.185,84 juta.

Sumbangan migas terhadap perkembangan perekonomian daerah ini dapat pula digambarkan melalui Pendapatan Regional Per Kapita. Pada tahun 1984, tanpa memperhitungkan sumbangan migas dan berdasarkan harga konstan tahun 1983, Pendapatan Regional Per Kapita di Aceh Utara adalah sebesar Rp.420.757,06. Apabila sumbangan migas dihitung, maka pada tahun itu Pendapatan Regional Per Kapita-nya menjadi Rp.3.699.498,83.

¹ PDRB ialah jumlah keseluruhan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi yang bergerak di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Indikator lainnya ialah realisasi ekspor Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara. Pada tahun 1991, nilai komoditi ekspor migas (LPG, LNG dan Condensate) berjumlah US\$ 3.480.318.213,30. Jumlah itu jauh lebih tinggi jika dibandingkan nilai ekspor komoditi non-migas yang hanya berjumlah US\$ 112.912.651,10. Data ini menunjukkan bahwa nilai ekspor migas adalah 30 kali lebih tinggi dari nilai ekspor non-migas. Bahkan dari komoditi ekspor non-migas terdapat pula beberapa jenis produksi industri besar, antara lain pupuk, ammonia dan kertas.

Uraian di atas menunjukkan dengan jelas bahwa perusahaan industri besar di Aceh Utara memang menempati posisi yang sangat penting bagi perkembangan daerah ini. Ditinjau secara periodik, misalnya masa antara 1983-1987, dengan melihat kepada hasil PDRB periode itu, berdasarkan harga konstan 1983 dan tidak mengkaitkannya dengan migas, maka pertumbuhan ekonominya menunjukkan angka rata-rata 4,84 persen per tahun. Apabila dalam periode tersebut migas diperhitungkan maka pertumbuhannya mencapai angka rata-rata 8,31 persen per tahun. Pada saat ini, semua perusahaan industri yang ada di ZILS, dalam kapasitasnya masing-masing tentu saja akan memberi sumbangan dalam peningkatan nilai pendapatan dari PDRB² Aceh Utara dan juga nilai Pendapatan Regional Per Kapita penduduknya.

Dengan hanya mengikuti gambaran di atas, mungkin akan mendorong kita untuk menyimpulkan bahwa program industrialisasi di Aceh Utara telah berkembang pesat dan sukses besar. Kesimpulan demikian memang ada benarnya, namun kehadiran industri besar di daerah itu ternyata juga menimbulkan masalah. Dengan kata lain, uraian di atas baru merupakan salah satu potret dari pembangunan industri dan belum menyentuh wilayah masalahnya yang lebih luas, kompleks dan secara lebih mendalam, yaitu hubungannya dengan masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan industri tersebut. Suatu

² Dilihat dari segi pendapatan, PDRB merupakan jumlah dari pendapatan yang diterima oleh sektor produksi yang dimiliki oleh masyarakat (penduduk) di suatu wilayah yang turut serta di dalam proses produksi baik swasta maupun pemerintah.

studi tentang masyarakat di suatu kawasan industri belum lengkap dengan hanya memfokuskannya kepada masalah ekonominya saja, sebab proses industrialisasi menyangkut banyak sisi dari kehidupan masyarakat.

Permasalahan

Kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri di Aceh Utara atau di kawasan ZILS, terutama disusun berdasarkan kepentingan nasional. Industri-industri di kawasan itu adalah aset nasional. Pembangunan dengan model pendekatan "top-down" (dari atas ke bawah) seperti itu menimbulkan bermacam masalah antara pihak industri sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat dengan pihak masyarakat daerah yang bertempat tinggal di

Masalah-masalah yang muncul diawali oleh perubahan fungsi wilayah yang semula merupakan kawasan pertanian kemudian dijadikan sebagai zona industri. Perubahan ini kemudian diikuti oleh perubahan komposisi pengelompokan penduduk. Sebelum industri, penduduk daerah ini pada umumnya terdiri atas penduduk lokal yang dalam kehidupannya berorientasi kepada nilai dan tradisi sukubangsa Aceh, corak kebudayaannya relatif homogen. Kehadiran industri yang menarik pula masuknya para pendatang, masing-masing dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda, menyebabkan terbentuk masyarakat majemuk (heterogen). Pada saat ini masyarakat ZILS dapat dibedakan ke dalam tiga kelompok sosial (*social groups*), yaitu kelompok penduduk lokal, kelompok pendatang bukan masyarakat industri, dan kelompok masyarakat industri baik yang berasal dari penduduk lokal maupun pendatang yang berstatus sebagai karyawan perusahaan industri besar.

Substansi terjadinya pengelompokan tersebut sebagai konsekwensi perubahan akibat keberadaan industri sebenarnya dapat dilihat dari dua segi pandangan. Pertama, masyarakat industri sebagai agen perubahan (*agent of change*) tidak dapat beradaptasi ke masyarakat, terutama masyarakat lokal. Kedua, masyarakat lokal sendiri menghadapi berbagai kendala untuk dapat mengadopsi atau

memanfaatkan peluang-peluang untuk mengembangkan diri dari kehadiran industri di daerah mereka.

Berbagai perbedaan sosial budaya di kawasan industri ZILS menunjukkan kenyataan, antara lain kebutuhan masyarakat industri lebih banyak disediakan oleh kelompok masyarakat pendatang melalui kedudukan mereka sebagai pedagang toko, pekerja perbengkelan, profesi guru, dan lain sebagainya. Bagi penduduk lokal, keberadaan industri tidak serta merta menempatkan mereka sebagai bagian yang terintegrasi ke dalam "masyarakat industri", tetapi lebih merupakan salah satu kelompok "masyarakat di kawasan industri". Bahkan karena mereka sulit pula mengimbangi dinamika kehidupan masyarakat pendatang, maka dapat dikatakan mereka sesungguhnya berada pada posisi sebagai kelompok masyarakat pinggiran (*peripheral group*).

Beberapa faktor yang membedakan masyarakat industri dari masyarakat lokal sebenarnya tidak terlepas dari sosok industri yang didirikan. Industri di kawasan ZILS mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: padat modal, menggunakan teknologi canggih, berorientasi keuntungan yang besar, produksi untuk ekspor, banyak merekrut tenaga kerja berpendidikan menengah ke atas dan memiliki ketrampilan serta bekerja secara profesional.

Meskipun penduduk lokal telah cukup lama berhubungan dengan masyarakat industri, tetapi ternyata keakraban mereka dengan ciri sebagai masyarakat agraris (*subsisten*), memanfaatkan teknologi sederhana, bekerja karena dukungan bakat alami dan berpendidikan rata-rata masih rendah, tetap menjadi identitas umum dan khas dari mereka. Keterkaitan mereka dengan nilai-nilai sosial budaya dan tradisinya sehingga cenderung memiliki daya pertahanan (*resistance*) terhadap pengaruh dari luar.

Adanya perbedaan-perbedaan tersebut yang disertai oleh kesulitan menciptakan suatu pola kehidupan masyarakat yang terintegrasi menyebabkan antara lain konflik kepentingan antar warga kelompok masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan, penggunaan kekuasaan dan/atau "tangan" penguasa di dalam menggunakan sumber daya alam. Akumulasi perbedaan-perbedaan yang ada dan belum adanya perantara (*broker*) yang sanggup menyelesaikan perbedaan-perbedaan itu berlandaskan kepada kepentingan masing-masing

kelompok masyarakat tersebut melahirkan pula kesenjangan dalam berbagai aspek.

Secara umum dapat diidentifikasi sumber-sumber kesenjangan-nya adalah sebagai berikut. Pertama, meskipun misi awalnya memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, namun ternyata pihak industri kemudian menjadi faktor yang menentukan, menguasai, mengubah dan, bahkan, mendiktekan kemauannya terhadap masyarakat lokal. Kedua, menghadapi keadaan demikian itu, sebagian warga masyarakat lokal mengalami kegoncangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam ketidakberdayaan menghadapi pengaruh industrialisasi, mereka akhirnya menganggap bahwa program industrialisasi hanyalah merupakan intervensi yang merusak harmoni sistem sosial budaya mereka dan bukan cara bagi pengembangan kehidupan yang lebih baik. Ketiga, masuknya para pendatang yang mengikuti kehadiran industri ternyata memiliki kemampuan ganda. Pada satu sisi secara relatif mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat industri. Pada sisi lainnya mereka mampu pula mengambil alih posisi sebagai "produsen" hasil-hasil bumi yang disukai masyarakat industri yang sebelumnya merupakan dominasi masyarakat lokal. Keadaan ini semakin mempersulit kedudukan masyarakat lokal sebab selain berusaha bertahan terhadap pengaruh industrialisasi, juga harus bersaing dengan para pendatang di dalam merebut peluang-peluang usaha yang muncul karena keberadaan perusahaan industri.

Terbentuknya suasana perkotaan (*urban sphere*) di kawasan ZILS dimana budaya kehidupan majemuk tampil sebagai realitas dan merupakan "daerah subur" bagi berkembangnya perbedaan kepentingan, dapat pula menjadi pendorong kelahiran berbagai aspek kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan. Akar potensinya bisa bersumber dari kesadaran primordialisme yang terlalu kuat, perbenturan nilai-nilai yang diagungkan oleh masing-masing kelompok sosial. Kuatnya masing-masing kelompok memperjuangkan kepentingannya yang disemangati oleh atribut primordialisme, tanpa memperdulikan nasib kelompok lainnya merupakan "jalan tol" bagi setiap perbedaan menjelma menjadi kesenjangan.

Pembahasan di atas secara jelas menunjukkan bahwa asal-usul kesenjangan adalah perubahan sosial yang merupakan dampak dari

pembangunan industri. Dalam masyarakat terjadi pengelompokan sosial, perbedaan-perbedaan sosial budaya. Apakah pengelompokan sosial itu melahirkan kesadaran kelas (*class consciousness*) atau hanya dalam bentuk jarak sosial (*social distance*)?. Demikian pula, apakah perbedaan-perbedaan sosial budaya itu akan menjelma sebagai stratifikasi sosial (*social stratification*) atau hanya berhenti pada perbedaan sosial (*social differentiation*) saja?. Kemudian, bagaimana wujud sebenarnya dari kesenjangan sosial budaya di kawasan ZILS?. Hal-hal itulah yang akan dijelaskan dalam uraian selanjutnya.

Pemikiran Teoritis

Masuknya industri ke suatu daerah yang memiliki deposit sumber daya alam yang besar, seperti di Aceh Utara, ditanggapi secara berbeda oleh warga masyarakat. Industri sebagai pembawa perubahan tidak hanya berdimensi pengembangan, kemajuan, menyadarkan penduduk setempat betapa pentingnya alam lingkungan mereka, pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi dan perlunya kerja keras untuk menjadikan sumber daya alam itu bermanfaat; tetapi juga berdimensi sebagai penyebab ketidakseimbangan, perbedaan sosial budaya, dislokasi struktur sosial, pergeseran nilai-nilai, perbenturan kepentingan, konflik dan juga kesenjangan sosial budaya.

Kesenjangan dan industrialisasi adalah dua hal yang saling berkaitan. Runciman (Runciman, 1969:45) yang mengutip Marx, menulis bahwa kesenjangan (*inequality*) merupakan "*the consequences of industrialization*". Konsepsi yang sama dikemukakan pula oleh David E. Forster (Forster, 1965:72) ketika dia menyatakan bahwa pembangunan [termasuk industrialisasi] menciptakan kesenjangan, sedangkan modernisasi menonjolkannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan dan kesenjangan berjalan seiring. Hanya saja tidak dapat disimpulkan bahwa kesenjangan tidak dijumpai pada masyarakat non-industri. Sebab, Andre Beteille (Beteille, 1969:147) antara lain menyatakan bahwa pada masyarakat agraris terdapat kecenderungan terbentuknya "*cumulative inequality*" (kesenjangan yang bertumpuk) di mana pemilik tanah (*landlord*) dapat

menikmati suatu posisi yang tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan politik.

Bagaimana industrialisasi menyebabkan kesenjangan? Dalam kaitan ini, Wilbert E. Moore (Moore, 1966:301) menjelaskan bahwa sesungguhnya industrialisasi tiada lain daripada "implikasi sosial dari perubahan-perubahan di dalam teknologi yang produktif". Sesuatu yang perlu dicatat dari batasan industrialisasi Moore adalah bahwa definisinya dapat digunakan untuk menjelaskan implikasi sosial dari berbagai proses teknifikasi dalam banyak sektor. Kemudian, apakah implikasi sosial yang disebabkan oleh industrialisasi dapat disebut kesenjangan? Untuk ini Ralf Dahrendorf (Dahrendorf, 1968:177 dan 1969:42) menegaskan bahwa "*inequality always implies the gain of one group at the expense of others*" (kesenjangan selalu menunjukkan perolehan suatu kelompok melalui pengorbanan kelompok lainnya).

Dari uraian singkat tetapi sistematis di atas semakin jelas bahwa kesenjangan sebagai konsekwensi industrialisasi menimbulkan implikasi dan perubahan sosial yang di dalamnya suatu kelompok (masyarakat) dapat mendapatkan keuntungan hanya jika merugikan kelompok lainnya. Apabila konsep ini dikaitkan dengan pembangunan³ dan persoalan kebudayaan⁴, maka sebuah definisi operasional tentang kesenjangan sosial budaya dapat dirumuskan. Definisi itu adalah sebagai berikut:

"Kesenjangan sosial budaya adalah perbedaan-perbedaan dalam pemenuhan kebutuhan yang disebabkan oleh perubahan sosial di dalam proses industrialisasi (pembangunan) dari

³ Pembangunan adalah "usaha untuk mengubah secara terencana lingkungan dan kebudayaan suatu masyarakat yang semula dianggap kurang efektif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan taraf kesejahteraannya dengan cara mengeksploitasi dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada di lingkungan hidupnya" (Suparlan, 1986).

⁴ Kebudayaan diartikan sebagai pola bagi tindakan atau tingkah laku (Suparlan, 1986; Geertz, 1984; Spradley dan McCurdy, 1987) yang merupakan seperangkat model-model pengetahuan yang digunakan untuk memahami, menghadapi dan memanipulasi lingkungan hidupnya.

beberapa kelompok masyarakat yang bersangkutan; dalam mana kelompok tertentu dari masyarakat itu dapat memenuhi kebutuhannya secara maksimal hanya karena mengorbankan (kepentingan) kelompok masyarakat lainnya”.

Kesenjangan sosial budaya (*socio-cultural inequality*) berbeda dari kesenjangan kodrati (*natural inequality*). Kesenjangan kodrati adalah perbedaan tingkat kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan karena antara lain faktor bawaan sejak lahir, seperti perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan (*gender inequality*). Sementara itu akar dari kesenjangan sosial budaya tidak terletak pada kodrat, tetapi lebih merupakan hasil rekayasa manusia. Dalam karya tulis ini, kesenjangan sosial budaya dikaji melalui dua cara. Pertama, mengkaji perbedaan-perbedaan aktual antar individu-individu dalam kaitannya dengan pendapatan dan kekayaannya (*economic inequality*). Kedua, mengkaji perbedaan norma-norma dan nilai-nilai (*norms and values*) yang dijadikan pedoman dalam hidup dan kehidupan masyarakat (Beteille, 1969:369).

Konsep kesenjangan sosial budaya dan hubungannya dengan industrialisasi yang dikemukakan di atas pada dasarnya tidak hanya sekedar perbedaan-perbedaan dari perubahan sosial akibat pendirian perusahaan industri, tetapi dalam perbedaan-perbedaan itu sendiri mengandung pula unsur-unsur disintegratif.

Tahapan Industri

Proses industrialisasi di Aceh Utara dapat diidentifikasi ke dalam tiga tahap yang menunjukkan keadaan yang berbeda-beda, yaitu tahap-tahap konstruksi, operasional dan pasca-gas. Tahap konstruksi ditandai oleh bermacam-macam kegiatan, antara lain pembebasan tanah penduduk atau tanah desa yang digunakan sebagai lokasi pembangunan industri; pembuatan tempat pemukiman kembali (*resettlement*) bagi warga desa yang tergusur; pembangunan pabrik dan perumahan keluarga karyawan industri.

Pembebasan tanah meliputi tanah penduduk secara individual (keluarga) dan tanah desa. Untuk itu jumlah biaya (ganti rugi)

pembebasan yang diberikan oleh setiap industri bervariasi. PT Arun NGL (1972) memberikan ganti rugi tanah antara Rp.100,00 sampai dengan Rp.180,00 per meter per segi. Pada tahun 1980, PT AAF memberikan ganti rugi yang jumlahnya berkisar antara Rp.300,00 sampai dengan Rp.350,00 untuk setiap meter per segi. Kemudian, pada tahun 1981, PT PIM membayarkan ganti rugi mulai dari Rp.800,00 sampai dengan Rp.1200,00 untuk satu meter per segi. Pembayaran ganti rugi juga dilakukan terhadap tanaman dan barang berharga lainnya, seperti rumah. Seorang responden di Desa Bangka Jaya menyatakan bahwa dia menerima Rp.600.000 sebagai ganti rugi pembongkaran rumahnya pada tahun 1980. Seorang lainnya mengaku menerima Rp.1,3 juta.

Penduduk lokal di empat desa penelitian (Batuphat Timur, Ujung Pacu, Tambon Baroh dan Bangka Jaya) umumnya menyatakan "sesuai" dengan keadaan ekonomi waktu itu terhadap jumlah ganti rugi yang diberikan. Hal ini dinyatakan oleh 35 responden (76%) dari sebanyak 46 responden yang mengaku ada tanah mereka yang terkena proyek industri.⁵ Dengan demikian hanya 11 responden (24%) dari jumlah tersebut memberikan tanggapan yang berbeda, antara lain: tidak adil, murah, kurang sesuai, dan sebagainya. Meskipun demikian, banyak responden yang mengeluhkan cara dan mekanisme pemberian ganti rugi, antara lain mereka mengatakan tidak ada kesepakatan sebelumnya. Ada pula yang menyatakan keputusan nilai ganti rugi dari pemerintah, ditakut-takuti, dipaksa, dan lain-lain. Sebagian besar responden tersebut (41 orang atau 89%) menyatakan kehilangan atau terganggu sumber mata pencahariannya, terpaksa melakukan pekerjaan lain, pindah pemukiman, karena tanahnya diambil alih oleh proyek industri.

⁵ Secara metodologis, untuk pengumpulan data, dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan beberapa informan kunci dan menggantinya melalui kuesioner dari 200 orang responden warga masyarakat lokal di empat desa, 140 responden masyarakat atau karyawan industri, dan 60 responden dari warga masyarakat pendatang.

Penduduk yang tergusur oleh proyek industri dibuatkan tempat pemukiman kembali yang baru. Untuk mereka yang tergusur oleh proyek MOI (Mobil Oil Indonesia) di Arun dan proyek PT Arun NGL di Blang Lancang dipindahkan ke pemukiman di Mbang. Sementara yang tergusur oleh proyek PT AAF dan PT PIM dipindahkan di pemukiman Cot Mambong.⁶

Upaya pemukiman kembali (*resettlement*) itu sebenarnya dapat dianggap adanya perhatian yang cukup positif, namun ternyata bukan suatu solusi yang tepat. Ketidaktepatannya terlihat pada akibat yang muncul kemudian dimana kondisi kehidupan mereka di lokasi pemukiman sangat memprihatinkan. Keprihatinan mereka sudah diawali sejak proses pemindahan yang kurang lancar, rumah di lokasi pemukiman belum siap huni, janji akan diberikan tunjangan dalam beberapa bulan sejak tinggal di pemukiman tidak terealisasi sebagaimana mestinya, sampai kepada kesulitan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kesulitan itu disebabkan oleh perubahan jenis pekerjaan pokok, misalnya dari profesi sebagai nelayan yang biasa hidup di daerah pantai, di pindahkan ke darat dan terpaksa bekerja sebagai petani kebun.⁷ Kesulitan lainnya, walaupun ada hasil dari kebun mereka tidak mudah memasarkannya karena selain tidak ada pasar yang dekat, juga pemukiman mereka jauh dari jalan yang dilalui kendaraan umum. Suatu masalah yang juga mereka ungkapkan adalah sertifikasi tanah yang digarap tidak terealisasi sebagaimana yang dijanjikan kepada mereka.

Berhubung keadaan di pemukiman tidak seperti yang diharapkan, akhirnya jumlah mereka yang bertahan di sana semakin kurang. Pada

⁶ Desa Mbang kurang lebih 70 Km dari Blang Lancang (PT Arun NGL) dan 35 Km dari Arun (MOI), sedangkan Cot Mambong 30 Km dari Tambon Baroh (PT PIM) dan Bangka Jaya (PT AAF).

⁷ Karena kehidupan di pemukiman memprihatinkan, maka sebagian dari mereka melakukan pekerjaan tambahan, seperti mengumpulkan batu gunung untuk bahan bangunan dengan upah Rp.1500 per hari. Pekerjaan ini tidak dilakukan setiap hari karena permintaan pemesan juga sangat terbatas. Ketika peneliti berada di Cot Mambong, seorang kepala keluarga menawarkan agar dapat membeli seekor dari kambingnya yang diikat di halaman rumahnya. Katanya, untuk biaya makan dan sekolah anaknya.

waktu dimukimkan jumlahnya ada 800 KK di Mbang dan sebanyak 400 KK di Cot Mambong (Tumanggor, 1986). Pada tahun 1992 (ketika tim peneliti mengunjungi dua pemukiman tersebut) di Mbang hanya tinggal 42 KK dan di Cot Mambong 35 KK. Sesuatu yang juga memprihatinkan adalah sejak mereka dipindahkan di daerah pemukiman lebih kurang 10 tahun yang lalu, tidak sekalipun pihak industri menengok mereka apalagi untuk mengulurkan bantuan. Padahal semua industri di ZILS memiliki program "*community development*" yang setiap tahun menganggarkan bantuan ke desa-desa sekitarnya. Bahkan, bantuan ke luar Aceh, seperti Ternate, pernah juga diberikan.

Pada tahap operasional, masalah yang dominan antara lain menyangkut ketenagakerjaan, masuknya para pendatang, kurangnya keterkaitan antara sistem perekonomian masyarakat lokal dengan kebutuhan masyarakat industri. Kehadiran industri besar di Aceh Utara sebagai sarana untuk bekerja memang sudah menampung banyak tenaga kerja. Pada tahun 1988, di lima perusahaan (MOI, PT Arun, PT AAF, PT PIM dan PT KKA) terdapat 6265 karyawan (Tim Pengendalian dan Pembangunan Wilayah Industri, 1989). Karyawan sejumlah itu terdiri atas Pimpinan/Direksi, Staf Manager, Karyawan Pabrik dan Karyawan Non-Pabrik. Pada tahun 1993, di perusahaan sasaran penelitian (PT Arun, PT PIM dan PT AAF) terdapat 4429 karyawan. Dari karyawan sebanyak itu, putra daerah Aceh menempati jumlah terbesar. Hal ini sesuai dengan harapan pemerintah daerah melalui SK Gubernur No.560/6772 tertanggal 1-12-1984 dan SK Bupati KDH Tingkat II Aceh Utara No.262/11628/1985(?) yang intinya menetapkan perlunya lebih banyak putra daerah Aceh yang bekerja di perusahaan-perusahaan industri besar di ZILS.

Adanya SK-SK tersebut memang mendorong perusahaan industri untuk merealisasikannya, namun karena kriteria "putra daerah"⁸ tidak

⁸ Yang dimaksud "putra daerah" berdasarkan kriteria itu adalah: (a) orang tua (salah satu orang tua) kandung adalah orang Aceh asli. Lahir dan/atau dibesarkan di Dista (Daerah Istimewa) Aceh; (b) lahir dan/atau dibesarkan di luar Dista Aceh, tetapi orang tua (salah satu orang tua) kandung adalah orang Aceh asli; (c) lahir di Dista Aceh; (d) menamatkan (lulus/berijazah) dari salah satu tingkat pendidikan (SD/SMT/PT) di Aceh; (e)

ketat, maka dapat pula dimanipulasikan oleh orang luar. Bahkan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan legalitas melamar pekerjaan di perusahaan industri. Oleh karena itu masih menimbulkan pertanyaan dan kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial terutama muncul pula dari penduduk desa-desa di sekitar industri (masyarakat lokal ZILS). Jumlah mereka yang bekerja di perusahaan industri besar terbatas dan biasanya sebagai karyawan/pegawai rendah, seperti Satpam dan sopir. Dari 140 responden karyawan industri, terdapat 34 responden (atau sekitar 24%) termasuk putra daerah - lahir dan orangtuanya (salah satu atau keduanya) berasal dari Aceh Utara. Apabila didasarkan kepada wilayah ZILS saja, yang meliputi 8 kecamatan: Muara Dua, Dewantara, Kuta Makmur, Muara Batu, Sawang, Nisan, Blang Mangat dan Banda Sakti) maka jumlahnya hanya 14 responden yang berasal dari wilayah zona industri tersebut.

Mengenai kurangnya keterkaitan antara kegiatan ekonomi masyarakat lokal dengan kebutuhan masyarakat industri dimaksudkan yaitu peluang ekonomi yang terbuka atas kehadiran industri besar tidak banyak dimanfaatkan oleh penduduk lokal di ZILS. Kebutuhan masyarakat industri, misalnya usaha catering untuk karyawan, usaha kebersihan di komplek pabrik dan kantor industri, di hotel atau guest-house, di komplek perumahan karyawan dan kontraktor perusahaan industri, lebih banyak dilakukan oleh pendatang dari luar, terutama pengusaha dari Medan. Kebutuhan keluarga masyarakat industri, seperti mini super-market di komplek perumahan karyawan, para pedagang toko dan pasar di desa-desa di mana perusahaan-perusahaan industri berfokus juga merupakan dominasi para pendatang.

Tahap pasca-gas, yaitu suatu masa ketika cadangan gas alam telah habis dari sumber-sumbernya saat ini. Dalam sebuah surat kabar ibukota⁹, pernah ada ditulis bahwa bila cadangan gas yang baru tidak ditemukan, maka pabrik kilang LNG PT Arun akan menghentikan produksinya pada dasawarsa pertama tahun 2000. Juga, jika hal itu benar terjadi akan mempengaruhi pula kinerja perusahaan industri

pada waktu pertama kali diterima di industri, sudah tinggal/menetap di Aceh selama minimal 5 tahun secara terus-menerus.

⁹ Lihat, *Suara Pembaruan*, 28 Januari 1993.

besar lainnya yang bahan bakunya diperoleh dari gas, selanjutnya berdampak pula kepada kehidupan masyarakat ZILS dan daerah-daerah lainnya. Ketika masalah ini ditanyakan kepada warga masyarakat lokal dan pendatang, maka dapat disimpulkan belum adanya rencana yang "mantap" untuk menghadapinya. Kelompok masyarakat lokal tidak terlalu peduli terhadap masalah itu. Hal ini disebabkan karena lemahnya posisi mereka dalam proses industrialisasi yang sedang berlangsung di daerah mereka saat ini. Bagi sebagian warga masyarakat pendatang, terutama pedagang toko dan pengusaha, sudah mempersiapkan diri menghadapi masa itu melalui pembukaan toko, usaha, di daerah asalnya. Bahkan beberapa pengusaha sudah mulai mengurangi karyawannya. Para pedagang menyatakan, jika gas sudah habis berarti keluarga karyawan industri besar di ZILS sudah angkat kaki dari sana, maka konsumen dari barang-barang yang mereka jual akan berkurang pula. Sementara itu daya beli masyarakat lokal yang memang relatif lemah akan tetap saja demikian.

Bagi karyawan industri masa pasca-gas tidak terlalu merisaukan, sebab mayoritas dari mereka adalah pegawai Pertamina, anggota ABRI, pegawai departemen/instansi tertentu yang diperbantukan di perusahaan industri besar di ZILS, sehingga dapat kembali lagi ke instansinya masing-masing. Karyawan yang tidak berasal dari instansi tertentu dapat pindah ke perusahaan lain yang membutuhkan, atau kalau tidak, menekuni kegiatan lain sebagai wirausaha. Untuk itu beberapa karyawan industri sudah mulai merintisnya, seperti mendirikan pesantren, membuka Perguruan Tinggi dan banyak diantaranya yang sudah membeli tanah di desa-desa sekitar. Semua itu tentu saja merupakan persiapan menghadapi masa depan.

Menjelang masa pasca-gas sebenarnya persoalan yang perlu pula diantisipasi secara dini, menurut beberapa informan, ialah bagaimana memanfaatkan peralatan, fasilitas industri yang mempunyai nilai investasi tinggi itu kelak agar dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Mengenai hal ini belum ada lontaran pemikiran yang muncul.

Pengelompokan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan

Setelah industri masuk pola pengelompokan sosial dalam pemenuhan kebutuhan di ZILS berubah secara bertahap. Penduduk di desa penelitian, yaitu di Batuphat Timur dan Tambon Baroh dimana perusahaan-perusahaan industri berlokasi, tidak lagi mayoritas orang Aceh tetapi orang pendatang. Di Batuphat Timur pendatang ada sekitar 62% dari jumlah penduduknya, sedangkan di Tambon Baroh sekitar 52%. Mereka mempunyai sumber penghasilan (mata pencaharian pokok) yang beragam, seperti pedagang, pegawai negeri, perbengkelan, pertukangan, usaha transportasi, kontraktor, dan lain sebagainya. Sementara itu mata pencaharian pokok masyarakat lokal ialah petani kebun, petani tambak, nelayan.

Namun, kedua kelompok tersebut berbeda pula corak dan pola pemenuhan kebutuhannya dengan masyarakat industri besar. Dalam pemenuhan kebutuhannya masyarakat industri sangat terikat kepada sistem yang diberlakukan industri. Dapat dikatakan hampir semua jenis kebutuhan mereka diorganisir oleh sistem industri. Dikatakan demikian karena pendapatan, perumahan, pendidikan anak, transportasi, kegiatan agama, seni/rekreasi/hiburan dan olahraga serta organisasi sosial karyawan, secara keseluruhan tidak terlepas dari kaitannya dengan sistem manajemen perusahaan industri. Singkatnya, pemenuhan kebutuhan karyawan industri dan keluarganya serba teratur, tersistem, terkoordinasi, terjamin dan relatif lebih seragam. Berbeda dengan masyarakat industri, corak dan pola pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal dan pendatang tampak biasa saja dan tidak adanya aturan-aturan yang mengikat secara ketat.

Perbedaan pemenuhan kebutuhan antara masyarakat industri dengan masyarakat lokal dan pendatang sebenarnya hampir meliputi semua aspek kehidupan. Sebagai contoh, dari segi jumlah penghasilan terkecil, seorang responden karyawan industri adalah Rp.250.000 per bulan dengan status sebagai pengetik di sebuah perusahaan; sedangkan diantara responden penduduk lokal masih ada yang hanya berpenghasilan Rp.30.000 per bulan. Penghasilan terkecil responden masyarakat pendatang Rp.100.000 per bulan. Dari segi jumlah penghasilan terbesar, diantara responden masyarakat industri ada yang

berpenghasilan Rp.4.400.000 per bulan dengan status sebagai Kepala Seksi (*Section Head*) di sebuah perusahaan; sementara dari 200 responden masyarakat lokal hanya seorang berpenghasilan terbesar, yaitu Rp.1.500.000 per bulan. Dari responden masyarakat pendatang penghasilan terbesar yaitu Rp.2.000.000 per bulan dengan profesi sebagai pedagang dan pengusaha perbengkelan.

Hal lain yang membedakan corak dan pola pemenuhan kebutuhan antara warga masyarakat industri dengan kelompok penduduk lainnya ialah beberapa segi pemenuhan kebutuhan masyarakat industri ditanggung oleh perusahaan. Mungkin sekali proporsi pengeluaran terbanyak per bulan bagi setiap keluarga masyarakat industri hanyalah untuk kebutuhan pangan dan sandang. Sebaliknya, untuk semua jenis kebutuhan bagi warga masyarakat lokal dan pendatang harus dikeluarkan biaya oleh mereka sendiri.

Uraian tentang pengelompokan sosial dalam pemenuhan kebutuhan di atas memperlihatkan bahwa dalam proses industrialisasi di ZILS, terutama di desa-desa yang bertetangga langsung dengan perusahaan industri besar, terjadi perbedaan tajam dalam pemenuhan kebutuhan. Pola pemenuhan kebutuhan masyarakat industri tidak terlepas dari pengaruh manajemen industri, sedangkan bagi masyarakat lokal dan pendatang pola yang umum adalah dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang ditekuni oleh setiap warganya.

Intervensi Industri dan Dampaknya

Industri besar sebagai suatu hal baru yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat non-industri, seperti masyarakat petani; bagi masyarakat tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk intervensi. Intervensi diartikan segala bentuk kegiatan industri untuk memanipulasi lingkungan (alam dan sosial budaya) warga masyarakat tempat industri itu dibangun. Intervensi industri ada dua jenis, yaitu intervensi langsung dan tidak langsung. Intervensi langsung adalah kegiatan industri yang sengaja diadakan untuk masyarakat di sekitar industri; sedangkan intervensi tidak langsung adalah kegiatan industri untuk pengembangan industri dan karyawannya, tetapi dampaknya dirasakan pula oleh masyarakat di sekitarnya.

Di tiga industri besar (PT Arun NGL, PT PIM dan PT AAF) terdapat berbagai kegiatan yang sengaja ditujukan untuk masyarakat sekitar. Kegiatan itu antara lain: CMC (*Civic Mission Clinic*), pengadaan pompa air untuk mengairi sawah, pembangunan Posyandu, pembangunan kantor desa, sumbangan untuk sekolah dan pesantren, pemugaran masjid/meunasah, kursus ketrampilan, pengiriman tenaga pengajar dan muballigh, pemilihan desa binaan, dan lain sebagainya. Semua kegiatan yang berwujud bantuan itu dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh "*Community Development*" suatu wadah/program dari perusahaan industri yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat di sekitar industri. Kemudian, intervensi tidak langsung antara lain berupa pembangunan jalan di sekitar kompleks pabrik dan perumahan karyawan industri, pemugaran kompleks, pendirian sarana pendidikan, penyediaan sarana olahraga dan kesenian, BDI (Badan Dakwah Islamiyah), dan lain sebagainya. Dengan demikian, menyangkut intervensi ini ada program berwujud fisik dan ada pula berupa non-fisik.

Menurut pihak industri semua jenis intervensi mempunyai urgensi yang sama, artinya semua memiliki asas manfaat dan tingkatannya sama penting bagi masyarakat sekitar. Berbeda dengan persepsi itu, masyarakat sekitar ternyata menilai tidak semua jenis intervensi industri sejajar. Meskipun demikian, semua hal itu dapat dilihat sebagai dampak intervensi.

Berbicara mengenai dampak tidak terlepas dari tanggapan positif dan negatif. Secara umum intervensi langsung industri dinilai positif oleh masyarakat. Namun, karena beberapa jenis intervensi itu hanya berpangkal tolak pada inisiatif pihak industri, tanpa mendasarkannya kepada kebutuhan yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat, maka rasa memiliki (*sense of belonging*), rasa ikut bertanggung jawab (*sense of responsibility*) dan rasa keinginan berpartisipasi (*sense of participation*) dalam menyambut bantuan-bantuan itu kurang dari masyarakat. Bahkan sebagian masyarakat menyatakan pemberian bantuan dari industri memang suatu keharusan. Sikap kritis masyarakat juga sering muncul dalam menanggapi intervensi tidak langsung industri. Beberapa contoh, yaitu pemugaran kompleks perumahan karyawan dianggap pertanda sikap eksklusif warga industri,

pencemaran dan gangguan amoniak dari industri dianggap kurangnya kepedulian pihak industri terhadap keselamatan lingkungan, kesehatan dan sumber mata pencaharian masyarakat. Bantuan BDI mereka nilai tidak ada kaitannya dengan perusahaan industri, tetapi hanyalah bantuan karyawan industri yang beragama Islam kepada masyarakat desa sekitar dan memang merupakan sesuatu keharusan dalam agama.

Analisa Kesenjangan Sosial Budaya

Benih-benih kesenjangan sosial budaya di kalangan masyarakat ZILS sudah ada sejak awal, yaitu ketika pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan industri dilakukan. Pada waktu itu "industri" telah menjadi suatu kekuatan yang menentukan cara pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal.

Potret kesenjangan yang terjadi mungkin diawali ketika pemindahan penduduk desa pantai ke wilayah pemukiman yang jauh dari pantai. Hal ini tidak hanya menjauhkan mereka dari sumber kehidupannya, tetapi juga mengorbankan keahlian mereka sebagai penangkap ikan di laut (nelayan). Wajah kesenjangan lainnya adalah merosotnya penghasilan petani tambak di desa Bangka Jaya selama bertahun-tahun akibat penutupan saluran air laut ke tambak-tambak mereka oleh pihak industri. Pencemaran air yang disebabkan oleh limbah industri dan sampai ke tambak-tambak udang masyarakat Ujung Pacu pernah sangat menurunkan tingkat penghasilan mereka. Gangguan pematangan yang diakibatkan oleh kebocoran gas amoniak pernah dirasakan oleh penduduk di Krueng Geukueh dan Tambon Baroh. Meningkatnya harga-harga di toko-toko dan pasar yang dipengaruhi oleh pola belanja masyarakat industri, dirasakan pula dampaknya oleh warga masyarakat lokal di ZILS.

Kehadiran industri besar di Aceh Utara memang sangat mendukung perkembangan PDRB daerah ini dan berpengaruh pula terhadap peningkatan pendapatan per kapita penduduknya. Namun, jika diperhatikan jumlah penghasilan per bulan antara karyawan industri besar dengan penduduk lokal ternyata masih menunjukkan kelemahan dari segi pemerataan. Keberadaan industri semestinya dapat mendorong peningkatan penghasilan penduduk sekitar, namun yang terjadi malah

sebaliknya. Dengan demikian, urgensi keberadaan industri terutama bagi masyarakat lokal masih perlu dipertanyakan.

Kesejangan sosial budaya tidak hanya tampak jika kehidupan masyarakat lokal dibandingkan dengan masyarakat industri, namun juga apabila diperhadapkan dengan kehidupan para pendatang. Peluang terbesar untuk melayani kebutuhan masyarakat industri yang seharusnya dimiliki oleh penduduk lokal, ternyata pada saat ini lebih banyak dikuasai oleh para pendatang. Keadaan ini disebabkan oleh faktor ketidaksiapan masyarakat lokal menghadapi era industrialisasi dibandingkan dengan para pendatang. Selain itu mungkin juga disebabkan oleh perhatian industri sendiri yang kurang terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat lokal. Mereka menganggap hal itu urusan pemerintah dan bukanlah urusan industri. Ditinjau dari segi perencanaan industrialisasi, gejala kurang cermat memperhitungkan resiko kerugian dari segi sosial budaya dalam pembangunan industri. Hal ini harus diartikan bahwa program industrialisasi tidak hanya mengkalkulasi kerugian masyarakat dari segi materi, tetapi juga yang bersifat non-materi.

Industrialisasi di Aceh Utara mendorong pula pembentukan kelompok sosial masyarakat industri yang cenderung menempati posisi "elite" karena membawa simbol-simbol kemajuan dan, dalam berbagai hal, bertindak sebagai penentu pola hidup dan kehidupan kelompok masyarakat lainnya. Tanpa mereka sadari, mereka menjadi "panutan" bagi kehidupan masa depan, terutama oleh generasi muda dari desa-desa ZILS. Ada gejala yang timbul sejak kehadiran industri di Aceh Utara, yaitu keengganan generasi mudanya (meskipun tanpa pendidikan yang memadai) untuk menekuni jenis-jenis pekerjaan "tradisional" seperti sektor pertanian, pertambakan dan penangkapan ikan di laut (menjadi nelayan). Kondisi ini tidak saja berimplikasi terhadap aspek ketenagakerjaan, terutama dengan meningkatnya jumlah pencari kerja, banyaknya pengangguran; namun juga mencerminkan sikap SDM (Sumber Daya Manusia) yang belum menentu.

Masuknya industri ke dalam lingkungan kehidupan masyarakat lokal memang dianggap sebagai suatu "kekuatan" baru oleh mereka. Sebagian warga masyarakat lokal menyebut industri dengan istilah

"wali" (pengayom) yang wajib memberi perhatian kepada masyarakat sekitarnya. Istilah ini memiliki nuansa Islami sesuai agama yang dianut oleh mereka. Kendatipun demikian, ia juga mengandung makna bahwa mereka memandang posisinya "inferior" ketika berhadapan dengan masyarakat industri. Kedudukan sebagai "wali" sudah direalisasikan oleh pihak industri dalam bermacam bentuk yang terakumulasi pada program "*community development*" di masing-masing industri besar. Programnya ialah pengembangan desa dan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu wujudnya ialah adanya desa-desa binaan oleh setiap industri besar. Hanya saja program ini pun kadang-kadang tidak terealisasi sebagaimana mestinya. Sebagai bukti ialah masih adanya desa-desa binaan industri besar yang tergolong desa miskin, penerima bantuan IDT (Inpres Desa Tertinggal). Ini berarti pembinaan industri yang sudah berlangsung lebih dari sepuluh tahun kurang bermanfaat dan tidak berhasil.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kesenjangan sosial budaya di ZILS Aceh Utara berkaitan dengan beberapa aspek. Pertama, corak dan pola pemenuhan kebutuhan kelompok masyarakat tidak hanya berbeda, tetapi juga kadang-kadang saling berbenturan. Kedua, perencanaan dan program industri seringkali kurang mencermati faktor sosial budaya, sehingga terjadi kekakuan dalam penanganannya ketika timbul masalah. Ketiga, faktor komunikasi kurang seirama antar berbagai pihak: perusahaan industri, pemerintah dan masyarakat. Keempat, sulit mencari perantara (*broker*) yang bisa menjadi penengah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul sebagai akibat keberadaan industri. Hal ini terbukti oleh masih adanya beberapa masalah yang sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa penyelesaian. Aspek-aspek tersebut, apabila tidak segera dibenahi, dapat menjadi pemicu timbulnya peristiwa lain yang mengarah kepada semakin lebarnya kesenjangan antar kelompok dalam masyarakat.

Penutup

Gejala kesenjangan sosial budaya sebagai produk proses industrialisasi sudah muncul sejak dimulainya pembangunan industri dan semakin menampakkan wujudnya dalam masa beberapa tahun

operasional industri. Kesenjangan terjadi antar kelompok, yaitu masyarakat industri, lokal dan pendatang yang meliputi perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan. Perbedaan-perbedaan pada aspek-aspek tertentu sangat besar sehingga menampakkan semacam jarak sosial (*social distance*). Bahkan karena keberadaan industri dapat menentukan corak pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal maka dalam kaitan ini muncul pula kesadaran kelas sosial (*social-class consciousness*). Sikap dan pandangan masyarakat lokal bahwa industri adalah "wali" (pengayom) semakin memperkuat tesis tersebut.

Dengan adanya karakteristik, sikap dan pandangan seperti itu memperlihatkan bahwa dalam masyarakat ZILS tampaknya sudah muncul semacam stratifikasi sosial (*social stratification*) yang baru. Dalam hubungan ini, masyarakat industri menempati strata (pelapisan sosial) atas, para pendatang pada strata menengah dan masyarakat lokal pada strata bawah. Strata-strata ini merupakan reflika dari pencapaian status sosial budaya (*achieved status*) dalam memberi respon terhadap tantangan proses industrialisasi.

Meskipun industri di ZILS Aceh Utara telah mendorong perkembangan daerah dan masyarakatnya, namun juga membawa kontribusi terhadap timbulnya kesenjangan sosial budaya. Dengan kata lain, program industrialisasi di daerah ini telah sukses membuahakan perubahan sosial budaya yang berorientasi kepada kemajuan, tetapi belum dapat memberikan solusi yang tepat terhadap masalah-masalah yang muncul dalam perubahan sosial itu yang justru menjadi inti kesenjangan yang terjadi. Hal seperti ini menjadi tantangan pembangunan di setiap daerah. Karenanya perlu dikembangkan strategi pembangunan industri yang bukan hanya sekedar memanfaatkan sumber daya alam dan manusia, memindahkan teknologi, tetapi juga strategi memperkenalkan nilai-nilai baru (nilai masyarakat industri) kepada masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aceh Utara Dalam Angka 1991*, Bappeda dan Kantor Statistik Aceh Utara.
- After, David E. 1965. *The Politics of Modernization*, Chicago: The University of Chicago Press.
- Beteille, Andre. 1969. *Social Inequality*, Middlesex, England, Penguin Books.
- Dahrendorf, Ralf. 1968. *Essays in Theory of Society*, Stanford, California: Stanford University Press.
- Moore, Wilbert E. 1966. "Industrialization and Social Change", dalam: Bert F. Hozelitz and William E. Moore (eds.), *Industrialization and Society*, Unesco, Mouton.
- Pendapatan Regional Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara 1983-1987*, Bappeda dan Kantor Statistik Kabupaten Aceh Utara.
- Runciman, W.G. 1969. "The Three Dimensions of Social Inequality", dalam: Andre Beteille (ed.), *Social Inequality*, Middlesex, England, Penguin Books.
- Suara Pembaruan*, 28 Januari 1993.
- Suparlan, Parsudi. 1986. "Kebudayaan Dalam Pembangunan", dalam: *Media IKA*, Nomor 11, Tahun XIV.
- _____. 1990. *Pengembangan Kebudayaan, Individu dan Masyarakat*, makalah diskusi, Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Mei.

- _____. 1992. "Parameter Tolok Ukur Pembangunan di Bidang Sosial Budaya - Ditinjau dari Segi Pembangunan Daerah", dalam: *Majalah Pancasila Abadi*, Oktober.
- Survey Pendapatan Asli Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara*, 1990. Bappeda Daerah Tingkat II Aceh Utara.
- TP2WI. 1989. *Perkembangan Zona Industri Lhok Seumawe (Suatu Laporan Singkat)*, Lhok Seumawe.
- Tumanggor, Rusmin. 1988/1989. *Sentuhan Sistim Community Development Industri Berskala Besar Terhadap Perubahan Masyarakat (Suatu Analisa Implementasi Kebijakan)*, Darussalam, Banda Aceh: PLPIIS - Universitas Syiah Kuala.